

IMPLEMENTASI PROGRAM MASYARAKAT BERBASIS RUKUN WARGA (PMB-RW) DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Evi Zubaidah, Ema Fitri lubis

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia

E-mail : evizubaidah@soc.uir.ac.id, emafitrilubis@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Masyarakat Berbasis Kelurahan (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat dan apa kendala yang ditemui dalam mengimplementasikan Program Masyarakat Berbasis Kelurahan (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan Koordinator Program PMB-RW di Kota, Fasilitator Pendamping di Kelurahan, Rukun Warga Pemanfaat Program PMB-RW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan termuat kepentingan baik itu untuk Koordinator kota dan wilayah pelaksana, maupun masyarakat pemanfaat program, masih kurang maksimalnya manfaat dan perubahan yang di peroleh dikarenakan sasaran dari program belum semua terlibat dalam kegiatan, letak pengambilan dan pelaksana kebijakan telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan. Sumberdaya dari segi kualitas cukup memadai namun dirasakan kurang dari segi kuantitas. Kendala yang ditemui adalah dari segi pemahaman masyarakat dan komunikasi yang kurang. Begitu juga dengan realisasi anggaran kegiatan yang kurang.

Kata kunci: Implementasi, Program PMB-RW

ABSTRACT

This research aims to the implementation of the community empowerment program based on citizens (pmb-rw) in the village of west subdistrict sidomulyo and what constraints encountered in implementing of the community empowerment program based on citizens (pmb-rw) in the village of west subdistrict sidomulyo. The methods used in this research is descriptive, qualitative data collection by way of interviews, observation, and documentation with the (PMB-RW) Program Coordinator-RW Companion Facilitators in the town, in the village, Along the citizens Program PMB Users-RW. The results showed that in terms of the interests that are affected by the policy are enshrined the importance either to the Coordinator of the city and the region, as well as implementing the community users of the program, still less the maximum benefits and changes in get the target because of the program's not all involved in the activity, the position of taking and executing policies were in accordance with the mechanisms and conditions specified. Resources in terms of quality is quite adequate but felt less in terms of quantity. Obstacles encountered is in terms of understanding the society and communication is lacking. So too with the realization of the activities budget less.

Keywords: Implementation, PMB-RW

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PMB-RW yang merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan disahkan serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Namun PNPM Mandiri pedesaan tidak lagi dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Hal ini seiring diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Program PMB-RW ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga, kota Pekanbaru membutuhkan kerjasama antar pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun warga (RW) itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru. PMB-RW ini ditargetkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing-masing RW.

Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PMB-RW telah dinyatakan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Program PMB-RW ini telah termuat didalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru. Arah dan jangkauan pengaturan Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru adalah mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah,

Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Fasilitator, Kelompok peduli tentang PMB-RW dengan membangun Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan Kelembagaan Rukun Warga sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan walikota Nomor 44 Tahun 2014 maka program PMB-RW ini mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan :

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi
2. Meningkatkan sosial kaum miskin
3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat
4. Pemeberdayaan dan pembangunan kapasitas lokal

Program PMB-RW ini memiliki lima strategi dasar untuk mencapai hasil dari implementasinya sendiri, yaitu :

1. Untuk penataan ruang kota
2. Melakukan pembenahan infrastruktur dasar
3. Penerapan pendekatan kota modern
4. Pengembangan kawasan perkotaan
5. Untuk pemberdayaan masyarakat

Untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga Kota Pekanbaru dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun Warga (RW). Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu mekanismenya adalah melalui Prinsip Tridaya yaitu Pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di kota Pekanbaru. Salah satu Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan.

Dari Pra-survey yang dilakukan penulis di Kelurahan Sidomulyo Barat terdapat beberapa fenomena yaitu kegiatan PMB- RW ini masih terlihat kurangnya respek dan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program Pemberdayaan masyarakat berbasis Rukun Warga ini.

Beberapa permasalahan empirik yang ditemukan dilapangan :

1. Mekanisme implementasi program PMB-RW sulit untuk dipahami oleh masyarakat. Hal ini terlihat bahwa masih ada Rukun Warga yang tidak mengetahui adanya program Pemberdayaan ini.
2. Menurut pemanfaat yaitu warga yang ada di rukun warga, program hanya bersifat pembinaan dan pelatihan, untuk kegiatan programnya sendiri belum ada yang diusulkan dan dijalankan.

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan yang penulis uraikan diatas, maka

penulis melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

B. Rumusan Masalah

Penulis membatasi penelitiannya pada Implementasi kegiatan di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan. Dari indikasi tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok penelitian ini, yang berupa:

1. Bagaimanakah implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru.
2. Untuk menganalisis apa saja kendala Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru.

D. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berpartisipasi dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dimasa mendatang, terutama dalam Pasca Sarjana Ilmu Administrasi khususnya bidang implementasi kebijakan publik.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan pemikiran bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam merealisasikan program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di kota Pekanbaru untuk mencapai tujuan yang lebih efektif.
3. Secara akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis lainnya yang mendalami masalah ini dan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

Studi Kepustakaan

A. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dipandang sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi paling tidak tiga kelompok tahapan kegiatan utama, yaitu:

1. Pembuatan atau perumusan kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen perencanaan), yang meliputi:
 - 1) Penyusunan agenda kebijakan,
 - 2) Perumusan kebijakan.
2. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: pelaksanaan/*actuating*); dan
3. Evaluasi kinerja kebijakan (merepresentasikan fungsi manajemen: *controlling*), yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemantauan, pengawasan (internal dan eksternal) dan pertanggungjawaban/*akuntabilitas* (Nugroho, 2004:123).

Berbagai program telah dipilih pemerintah sebagai alternatif pemecahan masalah dan diformulasikan dalam kebijakan publik harus diimplementasikan atau dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun instansi-instansi pemerintah tingkat bawah melalui mobilisasi sumberdaya finansial dan manusia. Keberhasilan sebuah kebijakan harus juga diiringi dengan pelaksanaannya yang baik. Bila cuma kebijakannya saja yang baik, tetapi tidak diikuti pelaksanaan/implementasinya yang baik, maka pencapaian target yang sudah di cita-citakan sebelumnya yang tergambar di dalam tujuan kebijakan, kemungkinan tidak akan dapat tercapai secara optimal. Kebijakan dan implementasi seharusnya saling mendukung dan saling berjalan selaras.

Menurut para ahli kebijakan, memberikan pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dari kebijakan yang direpson berupa aksi/tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan, 2008:7). Selanjutnya menurut Parsons (2005:464) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan dengan cara-cara lain. Sedangkan menurut Presman dan Wildavsky (1973) implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan (dalam Parsons, 2005:466). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Perda adalah kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2004:159). Adapun menurut Grindle (

dalam Nugroho, 2009 : 510) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai proses administrasi dan sekaligus sebagai proses politik, dimana keberhasilan dari implementasi tersebut akan ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi tersebut adalah :

1. *Content of policy* (Isi kebijakan) yang meliputi :
 - a. *Interest affected* (Kepentingan yang dipengaruhi)
 - b. *Type of benefits* (Tipe keuntungan/manfaat)
 - c. *Site decision of making* (Ruang lingkup perubahan yang diharapkan)
 - d. *Extent of change envisioned* (Letak pengambil keputusan)
 - e. *Program implementors* (Pelaksana-pelaksana program)
 - f. *Resources committed* (Sumber-sumber yang terlibat)
2. *Context of implementation* (Konteks/lingkungan/suasana implementasi) yang meliputi :
 - a. *Power, interest and strategies of actors involved* (Kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat)
 - b. *Institution and regime characteristics* (Karakteristik lembaga dan rejim)
 - c. *Compliance and responsiveness* (Pemenuhan dan daya tanggap)

Model Grindle ini lebih menitik beratkan pada konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, sasaran dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

B. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata “empowerment” menurut Webster dalam Priyono dan Pranarka (1996:3) mengandung pengertian yaitu : pertama adalah *to give power authority to*, dan yang kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

Sementara itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru

Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan. Salah satu mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru

Mengingat apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dimana peneliti memfokuskan kajian implementasinya di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Pekanbaru. PMB-RW ini ditargetkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing-masing RW. Namun dalam perjalanannya implementasinya ditemui beberapa permasalahan, maka dari itu penulis ingin meneliti tentang bagaimana Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) di kelurahan Sidomulyo Barat dilihat dari segi isi kebijakan (*content*) dan segi lingkungan kebijakan (*context*) yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dalam Riant Nugroho (2009, 510) yaitu isi kebijakan (*content*) terdiri dari : kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dipengaruhi. Sedangkan dari segi konteks implementasinya terdiri dari : kepentingan – kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat,

karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

A. Isi Kebijakan

1) Kepentingan yang Dipengaruhi Oleh Kebijakan

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan ini melihat bahwa sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan. Dimana kebijakan tersebut apakah akan membawa dampak tertentu terhadap macam kegiatan politik. Suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, yaitu pada implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) ini, berikut akan dijabarkan oleh peneliti berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dilapangan.

Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan yang dimaksud disini adalah apabila kebijakan Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) menimbulkan perubahan – perubahan terhadap hubungan sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Akan dapat merangsang munculnya perlawanan dari pihak – pihak yang kepentingannya terancam oleh kebijakan dari program ini. *Interest Affected* (kepentingan – kepentingan yang mempengaruhi) berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

Implementasi Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini sangat begitu berarti bagi pihak pengelola kegiatan. Sebagaimana yang disampaikan Koordinator Wilayah (kota) yaitu :

“Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang dilaksanakan di kota Pekanbaru pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014, waktu itu Kecamatan Tenayan Raya menjadi Pilot Project nya. Berkaitan dengan yang ditanyakan tadi tentu ada kepentingan dimanaprogram ini melalui Perda No 5 Tahun 2016 sudah memuat bahwa pelaksanaannya sampai ketahap Rukun Warga.. dimana melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Pada program ini juga kita memiliki Tim pendamping sampai ke kelurahannya. Hal ini tentunya dapat menjadi lapangan kerja bagi masyarakat untuk terlibat dalam tim pelaksana program”(Wawancara dengan Ketua Koordinator Kota, Pak Marhendi, ST, 22 Agustus 2018).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa bagaimana kepentingan dari organisasi Pengelola Kegiatan dipengaruhi oleh keberadaan

program PMB-RW. Sehingga program ini terus dipacu untuk tetap dilaksanakan. Kemudian peneliti mewawancarai fasilitator di kelurahan Sidomulyo Barat sebagai berikut :

“Program PMB-RW yang dilaksanakan di Kelurahan Sidomulyo Barat, kami sebagai pendamping merasa sangat bermanfaat bagi masyarakat, contohnya saja pada tahun 2016 bebrapa RW Prioritas di kelurahan Sidomulyo Barat mendapatkan alokasi dana bagi penataan kawasan lingkungan pemukiman.”(Wawancara dengan Fasilitator kelurahan Sidomulyo Barat, Pak Rahmat Haqiqi, A.Md, 08 September 2018)

Melihat hasil wawancara diatas dapat dilihat kepentingan yang ada pada implementasi Program PMB RW diatas membawa dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga kelompok sasaran yaitu masyarakat dapat mencapai tujuan program. Dimana jika implementasi program ini dijalankan maka masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang bersih, mewujudkan kesejahteraan, serta menciptakan kerukunan, keamanan dan kedamaian.

Dari observasi yang penulis lakukan dilapangan bahwa pada kelurahan Sidomulyo Barat ini masih tahap inisiasi. Kemudian penulis menanyakan kepada ketua RW 20 kelurahan Sidomulyo Barat yaitu :

“Kita sangat mendukung dengan adanya program ini, saya sebagai koordinator LKM dimana RW 20 sebagai Rw prioritas tahun 2016 memperoleh dana sebesar Rp 24.993.000, untuk semenisasi. ” (Wawancara dengan, Riyadi Mustofa, M. Si, 25 September 2018)

Begitu juga dengan jawaban dari ketua LKM RW Marsan Sejahtera sebagai berikut :

“kami senang pernah mendapat bagian dari RW prioritas yang mendapatkan alokasi dana penataan kawasan lingkungan pemukiman dengan kegiatan semenisasi jalan di wilayah RW 06 ini.” (Wawancara dengan Agus Prasetya Hutomo, SKM, 27 September 2018).

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program PMB-RW sangat begitu berpengaruh pada kepentingan masyarakat RW di selingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat. Namun kegiatan ini hanya pada aspek Lingkungan belum ada dilaksanakan dari aspek ekonomi dan sosial.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle pada indikator ini bahwa keberhasilan implementasi Program dipengaruhi oleh pihak kepentingannya yang dipengaruhi oleh kebijakan, yang tergambar pada program PMB-RW tersebut dapat dilihat bahwa kepentingan yang dipengaruhi baik itu ke pengurus Kota sampai kepada fasilitator di kelurahan dan

juga kepada wilayah cakupan penerima, dan masyarakat sebagai pemanfaat.

2) Manfaat Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) yang diterima oleh masyarakat

Pada indikator tipe manfaat ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Kebijakan – kebijakan tersebut dapat berbentuk program, dimana sesuai indikator jenis manfaatnya yaitu program yang memberikan manfaat secara kolektif atau terhadap banyak orang akan lebih mudah untuk memperoleh dukungan dan tingkat kepatuhan yang tinggi dari *target groups* (masyarakat) banyak.

Program PMB-RW ini terdapat jenis manfaat yang menggambarkan bahwa pengimplementasiannya dapat membawa dampak positif. Jika dilihat dari tujuan Program sesuai Perda No 5 Tahun 2016 ini yaitu :

1. Menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian
2. Mewujudkan kesesjahteraan masyarakat kota Pekanbaru
3. Dan menciptakan lingkungan Bersih, sehat, dan asri.

Berdasarkan tujuan tersebut terlihat manfaat yang sangat besar bagi masyarakat selingkungan RW di kelurahan Sidomulyo Barat khususnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan Koordinator Kota, yaitu :

“Program PMB-RW ini sudah dimulai sejak tahun 2014, ini masih tahap inisiasi dan Kecamatan Tenayan Raya sebagai pilot projectnya. Program PMB-RW tahun 2014 itu pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) senilai Rp 50.000.000,- kepada 94 Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) melalui rekening koperasi masyarakat. Berikutnya tahun 2015, program PMB-RW dilaksanakan berdasarkan usulan kebutuhan masyarakat meliputi, aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sampai kepada tahun berikutnya, melihat dari program ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat dikarenakan ada 3 aspek yang akan di usulkan untuk dibiayai. (Wawancara dengan Ketua Koordinator Kota, Pak Marhendi, ST, 22 Agustus 2018)

Dari wawancara diatas dapat dilihat bahwa terdapat ekspektasi yang tinggi agar program ini bermanfaat besar terhadap kemajuan masyarakat kota Pekanbaru umumnya dan kelurahan Sidomulyo Barat khususnya. Dari observasi yang penulis lakukan dilapangan program PMB-RW

yang ada di kelurahan Sidomulyo Barat ini masih tahap sosialisasi. Dimana masih dilakukan pembekalan dengan diadakannya seminar seperti latihan menjahit, tat boga dan kerajinan rajutan.

Untuk itu selanjutnya penulis mewawancarai pak ketua RW 20 sebagai ketua LKM di RW tersebut untuk melihat manfaat yang diterima oleh pemanfaat program PMB-RW ini sebagai pemanfaat langsung, yaitu sebagai berikut :

“iya, program ini memang bagus, kami y tentu mendukungnya, tetapi kami baru mewawawarakan rencana usulan apa yang akan kami ajukan, selama ini masih tahap sosialisasi saja, kalau pun ada dari kelurahan info ya untuk berpartisipasi pada pembekalan kerajinan tangan, jahit yang diadakan di kantor lurah ..” (Wawancara dengan, Koordinator LKM RW 20, Riyadi Mustofa, M.Si, 25 September 2018).

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat melalui ketua LKM nya menyampaikan bahwa mengetahui bahwa program ini memberikan dampak yang besar tetapi, beliau menyampaikan belum adanya terealisasi dana tersebut karena masih pada tahap sosialisasi saja. Begitu juga dengan jawaban dari Koordinator LKM Yepupa Madani, yaitu sebagai berikut :

“wah.. kalau ditanya manfaatnya, tentulah sangat bermanfaat. Hendaknya program ini bisa didanai untuk kegiatan ekonomi juga kalau sekarang usulan kita yang didanai ya bentuk semenisasi, alhamdulillah sekarang akses jalan di usulkan sudah bagus untuk dilalui.” (Wawancara dengan Riyadi Mustofa, M. Si, 27 September 2018).

Dari penjelasan Koordinator LKM tersebut dapat dilihat bahwa program PMB-RW ini telah terealisasi dari segi penataan kawasan lingkungan pemukiman walaupun harapannya program ini bisa mendanai usulan kegiatan ekonomi dan sosial yang tertera pada prinsip tridaya program PMB-RW. alokasi dana yang diberikan kepada Kelurahan Sidomulyo Barat dimana ada 3 RW prioritas yang di danai yaitu LKM Marsan Sejahtera, LKM Yepupa Madani, LKM Graha Wahana dan bentuk kegiatannya adalah semenisasi. Total dana yang diberikan adalah Rp 74.969.000 (Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dengan kegiatan semenisasi tentunya sangat membawa manfaat bagi RW di kelurahan Sidomulyo Barat. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara peneliti dengan koordinator LKM nya. Namun manfaat yang dirasakan hanya pada aspek lingkungan dan belum signifikan dirasakan warga sesuai dengan Prinsip Tridaya.

Kelurahan Sidomulyo Barat mengalami pemekaran dimana dari jumlah Rw lama sebanyak 33 Rw dan data baru menjadi 25 Rw. Begitu juga

dengan jumlah LKM dari data lama sejumlah 30 dan menjadi 22 LKM, hanya 3 RW yang menjadi skala prioritas untuk didanai kegiatannya, sedangkan RW lainnya belum ada yang terealisasi usulan kegiatannya untuk didanai. Hal ini senada dengan wawancara peneliti dengan fasilitator kelurahan Sidomulyo Barat, sebagai berikut

“Tahun 2016 terdapat 3 RW yang menjadi skala prioritas, baru 3 itu yang berjalan agenda kegiatannya, tapi yang saya tidak faham ada saja RW yang menolak kegiatan/program ini. Saya belum jelas alasan pastinya. Tentu ini disayangkan karena program ini bermanfaat bagi masyarakat”. (Wawancara dengan Fasilitator kelurahan Sidomulyo Barat, Pak Rahmat Haqiqi, A.Md, 08 September 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa program PMB-RW membawa manfaat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Tentunya manfaat yang dirasakan ini belum dirasakan warga kelurahan Sidomulyo Barat dikarenakan masih 3 LKM yang didanai usulan kegiatannya. Bentuk kegiatan yang didanai baru pada aspek lingkungan dan pada tahun selanjutnya belum ada usulan yang didanai lagi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari indikator jenis manfaat yang dihasilkan dapat dilihat bahwa Program PMB-RW di kelurahan Sidomulyo Barat ini masih kurang memberikan manfaat yang signifikan untuk membantu masyarakat. Seperti yang dijelaskan dari segi manfaat oleh teori Grindle ini adalah tipe manfaat berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Dari pengimplementasian program Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kelurahan Sidomulyo Barat ini memberikan dampak positif. Tetapi jika dilihat dari tujuannya yaitu: Menciptakan kerukunan, keamanan, dan kedamaian, mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota pekanbaru, dan menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan asri belum sepenuhnya tercapai.

3) Derajat Perubahan yang Diinginkan

Tahapan implementasi sebagai proses untuk mewujudkan tujuan kebijakan adalah tahapan yang sangat penting karena tahapan ini merupakan “jembatan” antara dunia konsep dengan dunia realita. Seperti Grindle (1980 : 6) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:65) yang menyebut bahwa implementasi *“establish a link that allows goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity”*. Implementasi kebijakan menjadi “jembatan” karena melalui tahapan ini dilakukan *delivery mechanism*, yaitu ketika berbagai *policy*

output yang dikonversi dari *policy input* disampaikan kepada kelompok sasaran sebagai upaya nyata untuk mencapai tujuan kebijakan.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, setiap kebijakan dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai bentuk tujuan kebijakan tersebut, salah satunya selalu dimaksudkan untuk melakukan perubahan tentang berbagai hal. Perubahan tersebut dapat saja hanya berupa hal – hal yang ‘sederhana’, misalnya tentang perubahan perilaku maupun yang berkaitan dengan nilai – nilai dan kepercayaan yang diyakini masyarakat.

Pada indikator ini dinilai sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Perubahan yang diinginkan dapat dirasakan dengan jangka waktu implementasinya. Program yang bersifat jangka panjang dan menuntun perubahan perilaku masyarakat dan tidak secara langsung atau sesegera mungkin dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat cenderung lebih mengalami kesulitan dalam mengimplementasinya.

Suatu program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan bantuan kredit atau bantuan beras kepada kelompok masyarakat miskin (Subarsono, 2005:93) dalam tesis studi implementasi program Raskin di Wilayah Kelurahan Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang oleh Mariyam Musawa. Dengan adanya program PMB-RW ini, masyarakat Kota Pekanbaru umumnya dan masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat sesuai dengan Visi Program PMB-RW yaitu :

“Mewujudkan masyarakat madani Kota Pekanbaru yang dimulai dari rukun warga”

Makna dari visi tersebut adalah :

- Arti mewujudkan merupakan cita-cita pemimpin Kota Pekanbaru dengan melalui proses Tridaya yang panjang agar terwujud masyarakat yang rukun, sejahtera dan lingkungan yang bersih, sehat dan asri
- Maksud masyarakat madani adalah hasil akhir suatu proses yang panjang dari kedua pendekatan pemberdayaan sehingga menghasilkan tatanan masyarakat mandiri, tangguh, dan berdaya saing secara lokal, nasional, maupun internasional dimulai dari kota pekanbaru.

Dari jabaran visi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Pekanbaru melalui program pemberdayaan ini memberikan kepercayaan kepada masyarakat di lingkungan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi kepada masyarakat Rukun Warga dalam rangka “mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani”

Indikator jangkauan perubahan yang dapat diharapkan telah jelas bahwa setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Penulis menanyakan kepada Koordinator Kota Program PMB-RW, yaitu sebagai berikut :

“Program PMB-RW ini adalah program pemberdayaan yang bentuknya partisipasi masyarakat, jadi kebijakan pemberdayaan selama ini tingkatnya kelurahan, maka pada program PMB-RW ini kita berharap masyarakat di tingkat Rukun warga dapat juga mengakses pembangunan maupun mengusulkan kebutuhan yang ada dilingkungannya, harapannya ya masyarakat bisa mandiri.” (Wawancara Dengan Koordinator Kota, Marhendi ST, 22 Agustus 2018).

Program berbasis pemberdayaan memang menjadi solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya masyarakat nantinya dapat lebih berdaya dan mandiri untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Jika dilihat dari program PMB-RW ini maka perubahan yang diharapkan adalah melalui prinsip tridaya yaitu:

1. Melalui pemberdayaan ekonomi yang menjadi sasarannya adalah kesempatan, lapangan kerja, dan daya beli sehingga nantinya dapat mencapai kesejahteraan.
2. Pemberdayaan sosial yang menjadi sasarannya adalah kesetiakawanan sosial dan diharapkan masyarakat dapat rukun
3. Pemberdayaan lingkungan yang menjadi sasarannya adalah sarana, prasarana, kelestarian lingkungan dan diharapkan dapat menjadi lingkungan yang bersih, asri, dan sehat.

4) Kedudukan Pengambil Keputusan

Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam implementasi kebijakan publik, baik secara geografis maupun organisatoris, akan semakin sulit pula implementasi program. Karena semakin banyak satuan-satuan pengambil keputusan yang terlibat di dalamnya. Dilihat dari segi struktur organisasi pelaksana program PMB-RW ini sudah dikatakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program dilapangan.

Berdasarkan uraian tugas pelaksana Program PMB-RW, semua mekanisme pengambilan keputusan terhadap pelaksanaan program telah disusun dengan baik. Namun dalam implementasi program PMB RW dengan mekanisme pengambilan keputusannya terlihat kurang terlaksana ini ditandai dengan observasi penulis dimana masih minim usulan kegiatannya didanai.

Berdasarkan wawancara penulis dengan koordinator kota pada Program PMB RW adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan kegiatan PMB-RW tahun 2016 minim diacc, artinya belum terealisasi usulan kegiatan LKMnya, itu dikarenakan adanya batasan anggaran APBD 2016”. (Wawancara Dengan Koordinator Kota, Marhendi ST, 22 Agustus 2018).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan buk Dr. Andin sebagai Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Investasi Bappeda Kota Pekanbaru yaitu :

“Program PMB-RW dari tahun 2014 dan dalam 5 tahun masih tahap inisiasi, memang sudah ada usulan kegiatan yang didanai yaitu dari aspek sosial sebagian dan lingkungan, pernah tahun 2016 pelaksanaan kegiatannya banyak yang belum terealisasi dikarenakan keterbatasan anggaran APBD 2016, ya tentunya mempengaruhi pelaksanaan kegiatan” (Wawancara dengan Kasubid Perekonomian dan investasi Bappeda Kota Pekanbaru, 17 September 2018)

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa dalam implementasi program terkait kedudukan pengambil keputusan masih kurang maksimal dilaksanakan. Hal ini walaupun telah diuraikan tupoksi dengan sangat detail tetapi masih terkendala dalam pelaksanaan karena keputusan ditingkat kota dengan terbatasnya anggaran menyebabkan kegiatan tidak terealisasi seluruhnya.

Berikut ditampilkan alokasi kegiatan PMB-RW tahun 2015-2017 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, yaitu :

Tabel 5.3 Alokasi Kegiatan Tahun 2015-2017

Kelurahan Sidomulyo Barat	Jumlah Alokasi kegiatan		
	2015	2016	2017
Kegiatan Fisik	-	-	-
Kegiatan Non Fisik	7	61	19

Sumber : Tim Koordinasi PMB-RW

Dari tabel diatas terlihat bahwa masih minimnya realisasi kegiatan PMB-RW di kelurahan Sidomulyo Barat terutama berkaitan dengan kegiatan fisik, sedangkan kegiatan non fisik jumlahnya menurun di tahun 2017 sebanyak 42 kegiatan. Kegiatan non fisik terkait dengan pelatihan- pelatihan keterampilan seperti menjahit, tata boga, perbengkelan, penyelenggaraan jenazah, pelatihan kompos, dll.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan dalam kedudukan pengambil keputusan belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dikarenakan Semakin terbarnya kedudukan pengambil keputusan.

5) Pelaksana Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat

Kemampuan pelaksana program akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Birokrasi yang memiliki staff yang aktif,

berkualitas, berkeahlian, dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan sangat mendukung keberhasilan implementasi program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan atau program.

Untuk itu pada indikator ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga di kelurahan Sidomulyo Barat dari segi pelaksana program / implementor program. Berikut hasil wawancara penulis dengan Kasubbid Perekonomian dan investasi Bappeda Kota Pekanbaru, sebagai ketua kelompok kerja kelembagaan tim koordinasi program PMB-RW Kota Pekanbaru :

“Untuk tahap inisiasi selama lima tahun ini masih banyak kendala dalam realisasi namun sudah ada beberapa pembekalan pelatihan yang dilaksanakan. Untuk tim koordinator tetap melaksanakan sosialisasi. Berdasarkan review pelaksanaan program PMB-RW tahun 2014-2016 untuk pelaksanaan kegiatan penataan kawasan lingkungan dari 166 RW prioritas hanya dialokasikan anggaran”. (Wawancara dengan DR. Andin, 17 September 2018)

Kemudian penulis mewawancarai koordinator kota untuk program PMB-RW yaitu :

“Tahap sosialisasi Program PMB RW dilaksanakan tingkat kota, sampai RW dan juga karena program unggulan oleh bapak Walikota Pekanbaru, pak Firdaus. Jadi beliau juga sering menyampaikan dalam kegiatannya menjelaskan program PMB-RW ini dengan melakukan perkenalan terhadap program ini melalui musyawarah”. (Wawancara dengan Koordinator Kota, Mahendi, ST, 22 Agustus 2018).

Dari segi pelaksana program untuk tahap sosialisasi telah dilaksanakan, namun jika dilihat dari data penerima usulan kegiatan Program masih sedikit dan lebih kepada kegiatan non fisik terutama di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat. Hal ini berkaitan dengan informasi dari fasilitator kelurahan masih ada RW yang menolak untuk kegiatan lingkungan Program PMB-RW.

Masyarakat kelurahan Sidomulyo Barat sebagai sasaran dari program PMB-RW ini juga merupakan bagian dari pelaksana. Dimana yang melaksanakannya melalui LKM RW masing – masing. Ketepatan sasaran untuk pemanfaat program PMB-RW, apakah program telah diberikan kepada mereka yang layak menerimanya yaitu seluruh RW di lingkungan Sidomulyo Barat.

Penentuan kelompok Penerima yaitu LKM RW yang mendapatkan bantuan adalah dengan pengajuan usulan proposal kegiatan kepada PA/PPK. Proposal yang diajukan oleh LKM

berisikan usulan permintaan pekerjaan yang akan dikerjakan secara swakelola dilengkapi dengan beberapa persyaratan diantaranya :

1. Melampirkan surat keputusan LKM-Rw yang ditanda tangani oleh Lurah;
2. Melampirkan Struktur Organisasi LKM-RW
3. Melampirkan NPWP LKM-RW;
4. Melampirkan surat keterangan status kepemilikan lahan/ bangunan yang ditanda tangani oleh pemilik lahan/bangunan, ketua LKM dan Lurah. Bahwa lahan/bangunan merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan seluruh warga bukan sebagai peruntukan pribadi;
5. Melampirkan KTP penanggungjawab LKM-RW;
6. Melampirkan rekening bank atas nama LKM-RW qq. Ketua LKM-RW dengan spesiment tanda tangan oleh ketua LKM-RW dan bendahara LKM-RW;
7. Usulan pekerjaan kontruksi; dan
8. Peta wilayah/profil LKM..

Seperti wawancara penulis dengan Koordinator Wilayah PMB-RW, sebagai berikut :

“Penentuan kelompok mana yang bisa alokasi anggaran adalah LKM-Rw yang mengusulkan kegiatan dan telah diverifikasi di kecamatan terhadap kelengkapan berkas. Kemudian Pengguna Anggaran menetapkan LKM-RW yang lulus verifikasi dan akan membentuk Tim pekerja swakelola yang ditetapkan oleh ketua LKM-RW. Ini dilakukan agar jelas siapa penggunanya dan sesuai seperti pada Petunjuk teknisnya.” (Wawancara dengan Koordinator Kota, Marhendi, ST, 22 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran yang diberikan adalah benar kepada LKM yang mengusulkan kegiatan Namun dilapangan penulis melihat bahwa penerimanya adalah masih kepada RW Prioritas. Sedangkan RW lain masih mada yang belum terrealisasi.

Gambar Kegiatan non fisik di kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan



Sumber: Dokumentasi Pada Kegiatan PMB-RW tahun 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa ini merupakan salah satu kegiatan non fisik dalam pelatihan Kerajinan tangan oleh RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat. Namun berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pemanfaat tersebut hanya sebagai pemberian materi pelatihan dan praktek sebentar saja untuk kemudian.

Berkaitan dengan hal diatas bahwa ini tidak luput dari kinerja implementor dilapangan. Untuk implementor kegiatan PMB-RW sudah ditetapkan baik untuk tingkat Kota sampai Kelurahan. Hal ini dilakukan agar semua tugas yang dilaksanakan sesuai dengan peran dari masing – masing implementor dan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

6) Sumber Daya yang Dikerahkan Dalam Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Sumber daya yang memadai baik dalam bentuk SDM dan Non SDM merupakan bagian pendukung keberhasilan implementasi suatu program/ kegiatan. Memadai disini artinya dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya yaitu ketersediaan dari sumber daya manusia sebagai pelaksana program PMB-RW ini juga harus memadai. Menurut (Goggin et. Al, 1990) dalam Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2012:149) jumlah SDM yang dimiliki oleh organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan misinya untuk mewujudkan tujuan organisasi.

“Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan PMB-RW ini mayoritas Sarjana, dan bahkan ada yang sudah S2. Di kelurahan Sidomulyo Barat sendiri ada 2 tim fasilitator

sebagai tenaga pendamping.” (Wawancara dengan fasilitator kelurahan, Rahmat Haqiqi, A. Md, 08 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa Sumber Daya Manusia sebagai Implementor di program PMB-RW yang ada di Kelurahan Sidomulyo Barat ini cukup berpendidikan dan berpengalaman. Akan tetapi untuk meningkatkan pengetahuannya perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan lagi agar kualitasnya mencukupi .

Jika dilihat dari struktur organisasi, lembaga pelaksana PMB-RW yang ada di Kota Pekanbaru bisa dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan program. Namun yang dirasakan kurang seperti yang diungkapkan dalam wawancara diatas adalah jumlah personel, terutama fasilitator pendamping Rukun warga. Beban Pendamping yang hanya 1 orang di kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah RW 25.

B. Lingkungan Kebijakan Program

Program PMB-RW merupakan Pengganti program PNPM yang telah dicanangkan pemerintah di tahun 2014. Program ini merupakan program unggulan dari walikota Pekanbaru, Firdaus, ST., MT. namun dalam pelaksanaannya berdasarkan wawancara dan observasi penulis masih minimnya partisipasi masyarakat dan ditandai dengan adanya RW yang menolak untuk didanai. Pemahaman Program PMB-RW tidak merata keseluruh elemen masyarakat. Pada tahun 2014 sampai 2016 pola komunikasi antara pendamping, Tim Koordinasi kecamatan dan LKM Kelurahan masih belum berjalan dengan baik.

Untuk penelitian berikutnya penulis melihat dari segi lingkungan kebijakan program PMB-RW menurut Grindle yang terdiri dari indikatornya sebagai berikut :

1) Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Strategi, sumber, dan posisi kekuasaan dari implementor akan menentukan keberhasilan implementasi suatu program. Kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari Implementor atau aktor yang terlibat dalam implementasi program diharapkan dapat mewujudkan kehendak atau keinginan masyarakat sesuai dengan tujuan dari program itu sendiri. Dengan strategi yang tepat maka sasaran dari kebijakan akan dapat menikmati output dari kebijakan tersebut.

Kekuasaan/kewenangan dan strategi pada program PMB-RW, adalah Tim Koordinasi Kota, Tim koordinasi Kecamatan, tim fasilitator, dan Lembaga keswadayaan Masyarakat Rukun warga (LKM-RW). Sedangkan strategi yang digunakan dalam mengimplementasikan program kegiatan PMB-RW adalah tahap sosialisasi dengan mengajak dan memotivasi kepada LKM RW agar ikut serta dalam program. Namun strategi dalam

menentukan sasaran sebagai pemanfaatnya dirasakan masih Minim. Ini tentu tidak sesuai dengan tujuan dari program yaitu kerukunan, kesejahteraan, dan bersih, sehat, dan asri.

Terkait hal ini dikarenakan strategi yang digunakan oleh tim pelaksana karena berdasarkan padaprinsip Tridaya. Sehingga perkembangan kelompok berkisar pada kegiatan non fisik saja tetapi diharapkan berlanjut ke kegiatan fisik dan masyarakat bisa mandiri.

2) Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa

Lingkungan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa yang mementingkan kepentingan rakyat tentu kesejahteraan warga akan tercapai. Namun akan terjadi sebaliknya jika rezim yang berkuasa lebih mementingkan kepentingan pribadi atau perorangan. Rakyat akan menjadi dipojokkan dan bukan menjadi prioritas, sehingga masyarakatlah yang akan menjadi korban dari rezim kepemimpinan yang berkuasa.

Peran dari lembaga yang mengimplementasikan program PMB-RW ini sangat mendukung terlaksananya program untuk kepentingan masyarakat. Namun di Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum secara maksimal dilakukan terutama pada sasaran dari kebijakan. Kurangnya memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan.

3) Kepatuhan Dan Daya Tanggap Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yaitu LKM-RW harus berperan aktif, karena hal ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan program dari pemerintah. Seyogyanya Program pemberdayaan ini adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini hendaknya dapat sejalan dengan pemerintah. Ini dilakukan agar apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam implementasinya dapat segera diketahui dan kemudian dapat dikoreksi dan dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun warga (PMB-RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat

Proses implementasi bukan hanya aktivitas administrasi semata, yaitu hanya dimaknai sebagai fungsi pembagian kerja, pembagian perintah dan mengawasi pelaksanaan suatu pekerjaan. Namun kenyataan yang sesungguhnya proses implementasi tersebut melibatkan berbagai elemen, seperti : kualitas kebijakan, kapasitas organisasi yang diberi mandat untuk mengimplementasikan kebijakan, kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan

untuk mengimplementasikan kebijakan, ketepatan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan, dan sebagainya.

Dari proses implementasi tersebut tentunya akan mengalami beberapa kendala. Adapun yang menjadi kendala dalam Implementasi program PMB-Rw di Kelurahan Sidomulyo Barat yang ditemukan penulis berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai berikut :

Pertama, pemahaman Program PMB-RW tidak merata diseluruh elemen masyarakat.

Kedua, komunikasi yang kurang maksimal antara pendamping, tim koordinasi kecamatan LKM Kelurahan. Komunikasi merupakan hal yang kendala yang ditemui dilapangan adalah analisis verifikasi usaha hanya dalam bentuk data saja. Ini tentunya dalam pencapaian perubahan pada kondisi ekonomi masyarakat belum tercapai, karena jika verifikasi dilapangan dengan melihat langsung kondisi pemanfaat maka akan lebih tepat dana tersebut digunakan.

Ketiga, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan 100% akan tetapi realisasi keuangan belum mencapai 100%. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran APBD pada tahun 2016 sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Implementasi Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kelurahan Sidomulyo Barat, dilihat dari :

a. Isi Kebijakan

1. Kepentingannya yang dipengaruhi oleh kebijakan, sasaran program belum sepenuhnya mengikuti kegiatan dikarenakan pengaruh beberapa kepentingan yaitu kepentingan yang dipengaruhi baik itu Koordinator kota sampai ke fasilitator kelurahan, dan juga kepada wilayah cakupan penerima sebagai syarat untuk mendapatkan dana fisik, dan masyarakat sebagai pemanfaat.
2. Dari segi manfaat pengimplementasian Program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat ini memberikan dampak positif. Tetapi jika dilihat dari tujuannya yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini dikarenakan umumnya masih terealisasi pada kegiatan non fisik seperti pelatihan belum ke ranah kegiatan fisik
3. Selanjutnya dari segi perubahan yang diharapkan belum maksimal dirasakan oleh masyarakat sebagai pemanfaat. Banyak faktor penyebabnya dimana salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari masyarakat akan manfaat yang diperoleh dan akan membawa perubahan. Anggapan bahwa Program PMB-

- RW hanyamerupakan program pemerintah yang sifatnya hanya formalitas dan sebagai proyek pemerintah saja.
4. Hasil Musyawarah di tingkat kota sampai ke Rukun warga dapat dilihat bahwa kedudukan pengambil keputusannya telah jelas dipaparkan letak pelaku – pelaku Pelaksana Program sesuai dengan tugas dan perannya masing – masing mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan. Monitoring bahkan sampai evaluasi.
 5. Untuk pelaksana program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat telah sesuai dengan alur yang ditentukan dan tugas yang relevan dengan fungsinya sebagai implementor.
 6. Sumber Daya Manusia yang dikerahkan pada Program PMB-RW ini telah cukup memadai, namun dari segi kuantitas terutama Fasilitator Kelurahan dalam melakukan pendampingan dirasakan kurang.
- b. Lingkungan kebijakannya (*context of implementation*)
1. Strategi yang digunakan oleh tim pelaksana masih kurang tercapai. sehingga perkembangan kelompok berkisar pada RW Prioritas saja, dan jika dilihat dari *value* kesejahteraan tampaknya belum tercapai
 2. Peran dari lembaga yang mengimplementasikan program PMB-RW ini sangat mendukung terlaksananya program untuk kepentingan rakyat. Namun di Kelurahan Sidomulyo Barat ini belum secara maksimal dilakukan terutama pada penentuan sasaran dari kebijakan. Meskipun secara rezim yang berkuasa, implementornya sangat antusias memotivasi masyarakat untuk terlibat.
 3. Kepatuhan dan daya tanggap disimpulkan bahwa respon warga masih Minim.

Kendala – kendala yang dihadapi dalam implementasi program PMB-RW di Kelurahan Sidomulyo Barat

- a. Pemahaman Program PMB-RW tidak merata diseluruh elemen masyarakat
- b. Komunikasi yang kurang maksimal antara pelaksana program PMB-RW.
- c. kegiatan yang telah dilaksanakan 100% akan tetapi realisasi keuangan belum mencapai 100%.

B. Saran

1. Hendaknya Pemerintah Kota Pekanbaru tetap mendukung keberlanjutan Program PMB-Rw ini agar pemerataan pembangunan dapat dinikmati keseluruhan masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat di RW supaya mandiri dan berdaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

2. Hendaknya diadakan pembinaan dan dilakukan kepada pemanfaat PMB-RW untuk ikut mengusulkan kegiatan dari ketiga aspek tersebut
3. Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait untuk pelaksanaan PMB-RW

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hettne, Bjorn. 2001. *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- I Nyoman Sumaryadi. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama
- Keban, Yoremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (edisi ke-2)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- , 2009. *Public Policy (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- , 2010. *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Soemitro, Sutastie remi dan Priyono Tjiptoherijanto. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Bandung : Pustaka Pelajar
- Sugyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wrihatnolo dan Nugroho. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta

Karya Akademis

- Siti Maisarah. 2017. *Dinamika Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PB-RW) Kota Pekanbaru*. Skripsi Universitas Riau
- Talgia. 2017. *Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Di Kota Pekanbaru*. Tesis IPDN Jakarta

- Tisa Juniazti. 2017. *Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Skripsi Universitas Riau

Dokumen dan Rujukan

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.
- Pedoman Umum dan Petunjuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru.